



MUSRENBANG RKPD KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2027



Pemerintah Kabupaten Sanggau melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sanggau Tahun 2027 pada Kamis, 12 Maret 2026 di Aula Hotel Harvey Sanggau. Kegiatan ini dihadiri sekitar 200 peserta yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, DPRD, instansi vertikal, perwakilan kecamatan, tokoh masyarakat, akademisi, organisasi kemasyarakatan, pemuda, perempuan, serta dunia usaha.



Kegiatan diawali dengan sambutan dan laporan Plt. Kepala Bapperida Kabupaten Sanggau, Shopiar Juliansyah, S.E., M.M. Dalam laporannya disampaikan bahwa Musrenbang RKPD merupakan forum strategis dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang bertujuan menyelaraskan usulan masyarakat dengan prioritas pembangunan daerah serta mengintegrasikan program dan kegiatan perangkat daerah dalam penyusunan RKPD Tahun 2027.

Musrenbang ini juga menjadi forum untuk menyepakati prioritas pembangunan daerah tahun 2027 serta menyelaraskan program perangkat daerah dengan usulan masyarakat yang telah dihimpun melalui Musrenbang desa/kelurahan dan kecamatan.



Selanjutnya Bupati Sanggau, Drs. Yohanes Ontot, M.Si dalam sambutan sekaligus paparannya menyampaikan bahwa arah kebijakan RKPD Kabupaten Sanggau Tahun 2027 difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan ekonomi masyarakat, pelestarian budaya, serta pembangunan infrastruktur dasar dengan dukungan pemerintah provinsi, mitra pembangunan, dan sektor swasta.

Beberapa prioritas pembangunan yang disampaikan antara lain penataan kawasan Arongk Belopa sebagai ruang terbuka hijau dan destinasi masyarakat, pengembangan UMKM melalui kegiatan Sabang Merah Weekend dan Sunday Morning, peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, serta penanganan gizi dan stunting. Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong pembangunan Kampoenk Budaya sebagai upaya pelestarian budaya dan penguatan ekonomi lokal serta melakukan pembinaan terhadap masyarakat hukum adat dalam menjaga kelestarian hutan dan lingkungan.

Pemerintah Kabupaten Sanggau juga mengharapkan dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam peningkatan penyediaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) untuk menekan angka putus sekolah, peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan kewenangan provinsi, serta penguatan sarana dan prasarana RSUD M.Th. Djaman dan pengembangan RSUD Temenggung Gergaji. Pemerintah daerah juga mendukung gerakan pengelolaan sampah melalui Gerakan ASRI dan GEMPITA, namun masih memerlukan dukungan pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan sistem sanitary landfill.



Arahan juga disampaikan oleh Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, S.IP., M.Si yang menegaskan bahwa Musrenbang merupakan proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari desa hingga provinsi. Kemajuan kabupaten/kota menjadi indikator penting bagi kemajuan provinsi.

Dalam arahannya disampaikan bahwa Kalimantan Barat memiliki potensi sumber daya alam yang besar, namun pengelolaannya harus mampu memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Wakil Gubernur juga menyoroti pentingnya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pengendalian inflasi daerah terutama menjelang hari besar keagamaan, serta mendorong daerah untuk meningkatkan produksi komoditas agar tidak terlalu bergantung pada daerah lain. Selain itu, optimalisasi potensi pendapatan daerah, termasuk dari sektor pajak kendaraan bermotor melalui mekanisme opsen pajak daerah, juga menjadi perhatian.



Dalam sesi diskusi, sejumlah peserta menyampaikan berbagai aspirasi dan masukan. Salah satunya dari anggota DPRD Kabupaten Sanggau Bapak Yeremias Marselinus, S.Pd.SD. terkait kondisi infrastruktur jalan provinsi di wilayah Kabupaten Sanggau seperti ruas Bodok–Meliau dan Kembayan–Balai Sebut yang sebagian mengalami kerusakan berat dan hingga kini belum tuntas pembangunannya. Selain itu disampaikan pula kebutuhan penambahan ruang kelas di SMA Negeri 2 Desa Bantai.

Perwakilan Polres Sanggau menyampaikan dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional melalui kegiatan penanaman jagung dengan target sekitar 556 hektare, sementara perwakilan TNI menyampaikan dukungan pembangunan desa termasuk pembangunan jembatan gantung dan koperasi perahu putih, meskipun menghadapi kendala terkait penyediaan lahan.

Dari unsur akademisi, disampaikan pentingnya penguatan pendidikan vokasi di Kabupaten Sanggau serta pengembangan PSDKU agar dapat berkembang menjadi Politeknik Sanggau. Selain itu juga diusulkan pemanfaatan teknologi seperti aplikasi GIS untuk memetakan potensi daerah dan inventarisasi kekayaan budaya masyarakat melalui penyusunan peta tematik.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, perangkat daerah terkait menyampaikan bahwa beberapa ruas jalan yang disampaikan merupakan kewenangan provinsi sehingga diharapkan dapat menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Sementara itu peningkatan pelayanan kesehatan dasar di tingkat desa serta program ketahanan pangan juga akan diperhatikan pemerintah daerah.

Melalui pelaksanaan Musrenbang RKPD ini diharapkan tercipta sinergi antara pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam menentukan arah pembangunan Kabupaten Sanggau Tahun 2027 sehingga pembangunan daerah dapat berjalan lebih terarah dan memberikan manfaat bagi masyarakat.